



Kearifan Lokal *Ongko* dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar

Muhammad Ihsan Maro^{1*}, Avelinus Lefaan¹, Ferry R.P.P¹, Sitorus, Sakaria To Anwar²

¹ Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia

² Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

*E-mail Korespondensi Penulis: muhammadihsanmaro73@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Local Wisdom, *Ongko*, Management, Coastal resources, Selayar Regency

How to Cite:

Maro, M. I., Levaan, A., Sitorus, F. R. R. P., Anwar, S. T. (2025). Kearifan Lokal *Ongko* dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 13(2): 72-83.

DOI:

10.31957/jeb.v13i2.4792

ABSTRACT

ongko means *taro-taro* (savings) or a claim of ownership over something (resources). *Ongko* is also commonly referred to as *pakkorong-korongang*, a term that means that with *ongko* that exists and is sustainable, the kitchen smoke can rise. *Ongko* local wisdom is a kinship-based natural resource management knowledge that has been used for generations by the coastal communities of Selayar Islands, South Sulawesi. This research is a qualitative study conducted in six sub-districts of the Selayar Islands mainland. This research used data from literature studies, interviews and observations. While the nature of this research is descriptive research which aims to provide a detailed and clear description of the problems studied. The results showed that *ongko* local wisdom is still practiced by the coastal communities of the Selayar Islands and has the requirements to be able to fulfill sustainable coastal resource management. However, to maximize these efforts, a series of steps need to be taken, including: providing reinforcement so that *ongko*, which is an individual claim or limited kinship group, is upgraded to a joint management claim and strengthening the *ongko* management institution so that there are arrangements for fishing time and the use of fishing gear.

Copyright © 2025 JEB. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Kearifan Lokal, Ongko, Pengelolaan, Sumber daya Pesisir, Kabupaten Selayar

Cara Mengutip:

Maro, M. I., Levaan, A., Sitorus, F. R. R. P., Anwar, S. T. (202x). Kearifan Lokal Ongko dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 12(2): 72-83.

DOI:

10.31957/jeb.v13i2.4792

ABSTRAK

ongko bermakna taro-taro (simpanan) atau klaim kepemilikan atas sesuatu (sumberdaya). Ongko juga biasa disebut dengan pakkorong-korongang, suatu istilah yang bermakna bahwa dengan ongko yang eksis dan sustain, maka asap dapur bisa mengepul. Kearifan lokal ongko merupakan suatu pengetahuan pengelolaan sumberdaya alam berbasis kekerabatan yang secara turun temurun telah digunakan oleh masyarakat pesisir Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di enam kecamatan daratan Kepulauan Selayar. Penelitian ini menggunakan data hasil studi literatur, wawancara, dan observasi. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal ongko masih dipraktikkan oleh masyarakat pesisir Kepulauan Selayar serta memiliki persyaratan-persyaratan untuk bisa memenuhi pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan. Hanya saja untuk memaksimalkan upaya pemenuhan tersebut, perlu dilakukan serangkaian langkah, antara lain: memberikan penguatan agar ongko yang merupakan klaim perseorangan ataupun kelompok kekerabatan terbatas, ditingkatkan menjadi klaim pengelolaan bersama serta memperkuat kelembagaan pengelola ongko sehingga ada pengaturan waktu penangkapan dan penggunaan alat tangkap.

Hak Cipta© 2025 JEB. Seluruh Hak Cipta.

1. Pendahuluan

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang seluruh wilayah daratannya terpisah dari kabupaten-kabupaten lainnya. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki 11 kecamatan, 6 kecamatan terletak di pulau utama (pulau Selayar) dan 5 kecamatan lainnya terletak di pulau-pulau di luar pulau utama. Terdapat 130 buah pulau, baik pulau besar maupun kecil, pulau berpenghuni maupun pulau yang tidak berpenghuni. Secara astronomis, Kepulauan Selayar terletak antara 5°42' – 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' – 122°30' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kepulauan Selayar memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Bulukumba, Timur – Laut Flores (Provinsi Nusa Tenggara Timur), Barat – Laut Flores dan Selat Makassar, dan Selatan – Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 km², dengan 1.357,03 km² adalah luas daratan dan 9.146,66 km² adalah luas wilayah laut (BPS, 2024).

Dengan komposisi wilayah yang didominasi oleh laut sebesar 87,08%, maka pesisir Kepulauan Selayar merupakan salah satu daerah dengan potensi sumber daya laut yang sangat melimpah, sehingga sumber daya laut menjadi salah satu tulang punggung perekonomian dan kehidupan masyarakatnya. Potensi ini mencakup antara lain hasil perikanan serta kehidupan laut yang beragam. Sebagian besar pemukiman penduduknya pun berada di daerah pesisir pantai. Data statistik menunjukkan bahwa dari 88 jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebanyak 62 desa/kelurahan terletak di wilayah pesisir pantai. Data Dinas Perikanan Kabupaten

Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa penduduk yang bergerak di sektor perikanan sebanyak 8.103 rumah tangga, kepemilikan alat tangkap sebanyak 7.298 buah, jumlah perahu/kapal perikanan sebanyak 6.677 buah (Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024a), produksi perikanan sebesar 25.432,36 ton, dan data produksi Unit Pengolahan Ikan (UPI) berskala mikro berdasarkan jenis pengolahan (terasi, bakso ikan/nugget ikan/otak-otak/bolu-bolu ikan/amplang ikan, penggaraman, dan abon ikan) sebanyak 244,91 ton (Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024b).

Dalam berinteraksi dengan kehidupan pesisir, masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki banyak kearifan lokal berupa pandangan hidup, ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan berwujud kreativitas. Kearifan lokal ini kemudian diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Di Kawasan Taman Nasional Laut Takabonerate misalnya, dulu dikenal memiliki sistem pemanfaatan dan kepemimpinan tradisional dalam pengelolaan sumber daya laut. Ada pengaturan musim penangkapan, jenis alat tangkap yang digunakan, lokasi dan biota laut yang akan ditangkap, walaupun dalam perkembangannya kemudian kearifan ini hilang dan berganti dengan pengelolaan yang cenderung eksploitatif (Azwar, 2007). Di perairan pesisir Kecamatan Bontomatene hingga Kecamatan Buki, terdapat alat tangkap *bila* (sero) yang memanjang menjorok dari garis pantai ke tengah laut.

Kearifan lokal secara formal bukan hanya dimiliki oleh masyarakat adat, akan tetapi kearifan lokal juga dimiliki oleh masyarakat yang telah beberapa keturunan menetap dan tinggal di suatu wilayah yang memiliki kebiasaan yang mentradisi diterapkan secara turun temurun oleh masyarakat tersebut. Perbedaannya adalah kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat memiliki perangkat kelembagaan yang mengontrol keberlangsungan kearifan lokal tersebut, sedangkan kearifan lokal yang mentradisi secara turun temurun tanpa kelembagaan yang mengontrolnya. Kearifan lokal adakalanya terdegradasi atau tergerus oleh gelombang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi sebaliknya kearifan lokal dapat menjadi acuan kembali ketika hasrat pembangunan dengan menerapkan pola-pola modern tidak mendukung kelestarian lingkungan dan berdampak negatif terhadap keberlanjutan pembangunan tersebut.

Jadi kearifan lokal merupakan sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, serta lingkungan yang hidup di tengah-tengah masyarakat lokal. Ciri yang melekat dalam kearifan lokal adalah sifatnya yang dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima oleh komunitasnya. Dalam komunitas masyarakat lokal, kearifan lokal mewujudkan dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan, dan juga keterampilan serta tata nilai dan etika yang mengatur tatanan sosial komunitas yang terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Mereka yang muncul dari komunitas lokal inilah yang hidup, tumbuh, dan bergelut dengan problem sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lingkungan, mempelajari kegagalan-kegagalan sampai menemukan solusi praktis untuk komunitasnya. Ilmu yang mereka dapat menjadi milik bersama komunitasnya tanpa diperdagangkan (Thamrin, 2013).

Secara sosiologis, karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris karena perbedaan karakteristik sumber daya yang dihadapi. Masyarakat agraris yang direpresentasi oleh kaum tani menghadapi sumber daya yang terkontrol, yakni pengelolaan lahan untuk produksi suatu komoditas dengan hasil yang relatif bisa diprediksi. Karakteristik tersebut berbeda sama sekali dengan nelayan. Nelayan menghadapi sumber daya yang hingga saat ini masih bersifat akses terbuka (*open access*). Karakteristik sumber daya seperti ini menyebabkan nelayan

mesti berpindah-pindah untuk memperoleh hasil maksimal. Dengan demikian, elemen resiko menjadi sangat tinggi. Kondisi sumber daya yang beresiko tersebut menyebabkan nelayan memiliki karakter keras, tegas, dan terbuka (Satria 2015).

James M Acheson (1981) dalam (Supriadi Adhuri 2005), seorang ahli Antropologi Maritim yang reputasinya mendunia sebagai ahli ilmu sosial tentang kelautan, khususnya dunia kenelayanan dan perikanan laut, menjelaskan beberapa karakteristik laut yang khas, yang oleh karenanya menuntut manusia untuk beradaptasi secara khusus pula. Secara khusus dia mengatakan:

”Kegiatan melaut (*fishing*) terjadi pada lingkungan yang heterogen dan tidak menentu. Ketidaktentuan ini tidak hanya berasal dari lingkungan fisik, tetapi juga lingkungan sosial di mana kegiatan melaut dilakukan.

Laut adalah dunia yang berbahaya dan asing, dimana manusia diperlengkapi secara minimal untuk bertahan hidup. Laut adalah dunia di mana manusia hanya bisa memasukinya dengan bantuan alat buatan (perahu, alat selam, dll), itupun jika cuaca dan kondisi laut memungkinkan. Ancaman yang konstan dari ombak kencang, kecelakaan, dan kerusakan mekanis membuat kegiatan melaut menjadi pekerjaan yang paling membahayakan.

Banyak zona ekologi yang terdiri dari berbagai macam species yang memiliki kebiasaan hidup berbeda. Ikan juga bergerak dari satu tempat ke tempat lain [dalam ruang tiga dimensi] dari satu musim ke musim lain dan jumlahnya bisa berfluktuasi dengan kadar yang sulit ditebak, terutama oleh nelayan kecil. Dengan katakter laut dan sumberdaya seperti itu, kehidupan nelayan tidaklah mudah dan penuh dengan ketidakpastian.”

Salah satu bentuk kearifan lokal di Kabupaten Kepulauan Selayar yang masih bertahan hingga saat ini dikenal dengan sebutan "*ongko*", memiliki peranan krusial dalam pengelolaan sumber daya laut dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Ongko* merupakan kearifan lokal yang mentradisi secara turun temurun tanpa kelembagaan yang mengontrolnya. Abdurrahim, dkk (2015) menyebutkan bahwa *ongko* adalah suatu kawasan perairan yang dikuasai oleh seseorang atau keluarga karena wilayah tersebut memiliki sumber daya ikan yang melimpah. Tanda-tanda wilayah ini antara lain terdapat pusaran air, permukaan laut berbusa, banyak didatangi burung, tetapi perairan ini sangat berbahaya. Penguasaan wilayah ini dirahasiakan dan dikeramatkan oleh penguasanya. Penguasaan wilayah ini lalu diwariskan melalui penuturan lisan kepada anggota keluarganya. Jadi *ongko* adalah kawasan perairan yang dijaga dan berhasil ditandai berkat pengetahuan dan pengalaman menemukan kawasan yang memiliki sumber daya ikan yang melimpah.

Dengan defenisi tersebut di atas, maka *ongko* merupakan kearifan lokal masyarakat pesisir Selayar yang yang adaptif dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep *ongko* dan cara penerapannya dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dapat memberikan pandangan yang berharga bagi pengambil kebijakan, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar dan wilayah pesisir

lainnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan secara komprehensif tentang bagaimana kearifan lokal *ongko* dapat menjadi penunjuk arah bagi pengelolaan sumberdaya pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan makna *ongko* bagi masyarakat pesisir di Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Menjelaskan bagaimana masyarakat memanfaatkan *ongko* dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan, sehingga memperlihatkan bahwa sebenarnya *ongko* merupakan sebuah kearifan lokal.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Kepulauan Selayar dipilih karena memiliki konteks yang relevan dengan topik penelitian, yaitu sebagai daerah pesisir dan pulau-pulau dengan potensi sumberdaya pesisir yang signifikan dan kearifan lokal *ongko* yang masih dipraktekkan oleh masyarakat pesisir Kepulauan Selayar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam kearifan lokal *ongko* dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pendekatan ini akan membantu mengeksplorasi nilai-nilai, tradisi, dan pengetahuan lokal yang ada, serta bagaimana hal-hal ini mempengaruhi proses pembangunan sumberdaya pesisir. Kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk merekam pengalaman subjektif dan pandangan masyarakat terkait praktik *ongko* yang mereka lakukan. Juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aspek, sudut pandang, dan pengalaman masyarakat dengan lebih detail. Penelitian deskriptif biasanya digunakan untuk menunjukkan deskripsi mengenai fenomena alamiah dan fenomena yang tengah direkayasa oleh manusia. Fenomena ini bisa saja termanifestasi dalam aktivitas, bentuk, hubungan, perubahan, karakteristik, dan perbedaan antar fenomena (Linarwati, dkk, 2016).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan sumberdaya pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar. Data tersebut berupa kebijakan pemerintah daerah maupun program-program yang terkait dengan pembangunan daerah pesisir serta data tentang pelaksanaan *ongko*. Sumber datanya adalah nelayan, tokoh masyarakat lokal (pemuka agama dan pemuka pemerintahan setempat), pemangku kebijakan daerah, dan ahli terkait (aktivis LSM/pemerhati program-program di bidang perikanan). Sedangkan data sekunder akan diperoleh melalui sumber-sumber seperti laporan penelitian terdahulu, dokumentasi pemerintah daerah, dokumen kebijakan, dan literatur terkait yang mendukung pemahaman tentang konteks pembangunan pesisir dan peran kearifan lokal *ongko*. Data sekunder ini termasuk data yang sifatnya kuantitatif.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu *pertama*, Observasi Partisipatif, Peneliti akan terlibat langsung dalam aktivitas masyarakat sehari-hari yang berkaitan dengan *ongko*. Melalui observasi ini, peneliti dapat mengamati praktik kearifan lokal, interaksi antara anggota komunitas, serta penggunaan sumber daya yang ada di *Ongko*. *Kedua*, Wawancara Mendalam, Peneliti akan melakukan wawancara dengan berbagai pihak, termasuk nelayan, tokoh adat, dan pemerintah setempat. Pertanyaan wawancara difokuskan pada pengalaman mereka dalam pengelolaan *ongko*, tantangan yang dihadapi, serta nilai-nilai kearifan lokal

yang masih dipertahankan. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, sehingga memberikan fleksibilitas bagi informan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pandangan mereka. *Ketiga*, Studi Dokumen, Peneliti juga akan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, seperti peraturan dan kebijakan lokal, serta catatan sejarah yang relevan dengan pengelolaan kearifan lokal *ongko*. Dokumen-dokumen ini akan memberikan konteks yang lebih luas terkait pengelolaan *ongko* di wilayah tersebut.

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumen akan dianalisis secara kualitatif. Proses analisis meliputi beberapa langkah sebagai berikut:

- 1) **Transkripsi Data:** Semua wawancara yang dilakukan akan ditranskripsikan untuk menghasilkan data teks yang bisa dianalisis. Setiap transkrip akan diperiksa untuk memastikan akurasi dan validitas informasi yang diperoleh.
- 2) **Kategorisasi dan Koding:** Peneliti akan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema atau kategori tertentu yang muncul, seperti praktik kearifan lokal, nilai-nilai budaya, serta tantangan dalam pengelolaan *ongko*.
- 3) **Analisis Tematik:** Setelah data dikategorikan, peneliti akan melakukan analisis tematik untuk menggali pola dan hubungan yang ada pada data. Hal ini dapat mencakup identifikasi praktik terbaik yang berasal dari kearifan lokal, serta pemahaman tentang dampak pengelolaan *ongko*. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subyektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti dan bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu-isu lain yang berkaitan dengan topik tersebut (Poerwandari, 2007).

Data dari *indepth interview*, terdiri atas kutipan langsung mengenai pengalaman, opini, perasaan, dan pengetahuan pemangku kepentingan terkait *ongko*. Isu-isu yang bersifat umum ditetapkan untuk menjaga pembicaraan dalam wawancara, agar tetap dalam fokus penelitian. Oleh karenanya pedoman wawancara disusun untuk menjaga aspek-aspek yang digali. Selain itu, agar peneliti mampu dengan maksimal memanfaatkan waktu yang terbatas dengan subjek, sehingga proses penelitian ini berjalan dengan lancar.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi dan memahami praktik kearifan lokal dalam pembangunan masyarakat pesisir, khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berharap dapat menggali wawasan yang lebih dalam mengenai nilai-nilai lokal, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana pengelolaan berbasis kearifan lokal dapat diterapkan untuk menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan. Hasil analisa data tersebut kemudian dijadikan hasil kesimpulan akhir dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Makna *Ongko* Bagi Masyarakat Pesisir Kepulauan Selayar

Sebagian besar pemukiman penduduk berada di daerah pesisir pantai. Data statistik menunjukkan bahwa dari 88 jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebanyak 62 desa/kelurahan terletak di wilayah pesisir pantai. Secara harfiah, masyarakat pesisir merupakan sekumpulan manusia yang bertempat tinggal dan menghuni wilayah pesisir, memiliki kebudayaan serta membentuk suatu yang khas terkait pemanfaatan sumber daya dan lingkungan pesisir.

Masyarakat pesisir Kepulauan Selayar memiliki beberapa bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir dan laut. Di Kawasan Taman Nasional Laut Takabonerate yang berada di Kec.Takabonerate, dulu dikenal memiliki sistem pemanfaatan dan kepemimpinan tradisional dalam pengelolaan sumber daya laut yang disebut *Panglima Menteng*. Ada pengaturan musim penangkapan, penggunaan jenis alat tangkap, lokasi dan biota laut yang akan ditangkap, walaupun dalam perkembangannya kemudian kearifan ini berangsur hilang dan berganti dengan pengelolaan yang cenderung eksploitatif, bom dan bius (Azwar, 2007). Pengeboman ikan pada mulanya menggunakan bahan peledak komersial, kemudian berkembang dan cenderung membuat bahan peledak sendiri dengan menggunakan pupuk kimia. Setiap bom beratnya kurang lebih 1 kg dan ledakannya membunuh ikan dalam radius 15 – 20 meter, terumbu seluas 500 m² dan menciptakan lubang di terumbu dengan diameter 3-4 meter, dan pengebom mencari ikan yang hidup berkelompok (ikan bibir tebal, kerapu, ekor kuning, kakap tua dan surgeon) yang menjadi sasaran utamanya (Risnawati, 2016).

Salah satu kearifan lokal yang masih bertahan hingga saat ini disebut dengan *ongko*. *Ongko* adalah bahasa Selayar yang bermakna *taro-taro* (simpanan), simpanan sementara yang diberi tanda, ataupun klaim kepemilikan atas sesuatu (sumberdaya). *Ongko* juga biasa disebut dengan *pakkorong-korongang*, suatu istilah yang bermakna bahwa dengan *ongko* yang eksis dan *sustain*, maka asap dapur bisa mengepul. Kearifan lokal *ongko* merupakan suatu pengetahuan pengelolaan sumberdaya alam berbasis kekerabatan yang secara turun temurun telah digunakan oleh masyarakat pesisir Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan. *Ongko* dalam pengertian demikian tidak hanya dipakai sebagai istilah di daerah pesisir dan laut, akan tetapi juga dipakai di darat, sungai, dan hutan. Dalam konteks ini, maka *ongko* bersifat insidental dan bersifat sementara, hanya untuk mendapatkan manfaat di waktu dan tempat tertentu. *Ongko* tidak bersifat permanen. *Ongko* sangat bersifat rahasia dan tertutup.

“Ongko dalam bahasa Selayar adalah klaim kepemilikan atau hak pengelolaan atas suatu tempat atau bagian yang mendatangkan hasil. Bisa jadi di hutan, di sungai, di laut, atau di tempat lain. Misalnya sebuah bagian sungai ditandai dengan batang kayu, rumput, daun-daun, dan lain-lain, maka itu merupakan ‘ongko’ orang yang memberi tanda itu. Dan orang lain tidak dibenarkan menangkap ikan, udang, kepiting, dan lain-lain di situ” (Wawancara dengan Informan Hasan B).

Abdurrahim, dkk, (2015) menyebutkan bahwa *ongko* adalah suatu kawasan perairan yang dikuasai seseorang atau keluarga karena wilayah tersebut memiliki sumber daya ikan yang melimpah. Tanda-tanda wilayah ini antara lain terdapat pusaran air, permukaan laut berbusa, banyak didatangi burung, tetapi perairan ini sangat berbahaya. Penguasaan wilayah ini dirahasiakan dan dikeramatkan oleh penguasanya, lalu diwariskan melalui penuturan lisan kepada anggota keluarganya. Meskipun hampir semua nelayan di Selayar memiliki pengetahuan tentang tanda-tanda *ongko* ini, namun tidak semuanya bisa menemukan dan menguasai *ongko*. Keberadaan sebuah *ongko* biasanya disertai dengan ancaman bahaya yang ada di kawasan perairan tersebut, entah berupa arus yang sangat kuat, angin kencang, bahkan gelombang laut. Hanya nelayan dengan daya juang tinggi dan memiliki daya tahan kuat yang bisa menaklukkan bahaya *ongko* dan menguasainya. Karena itulah, keberadaan *ongko* menjadi rahasia dan tetap dirahasiakan para pemiliknya. Bahkan, para pemilik *ongko* cenderung mengeramatkan *ongko* mereka dengan cerita-cerita

mistik yang dikaitkan dengan isyarat-isyarat alam yang bisa menakut-nakuti nelayan lain untuk datang ke sana. Cerita mistik biasanya berkisar tentang makhluk laut yang menjadi penunggu di *ongko*. Para penunggu ini biasa digambarkan muncul dengan cara menunjukkan sampan yang bisa berdiri di atas laut. Atau sampan yang bisa bergoyang sendiri.

Jadi *ongko* bukan alat tangkap seperti jaring, *sero*, bubu, maupun yang lainnya, melainkan merupakan keahlian atau pengetahuan yang dimiliki oleh nelayan dalam mengenali lokasi-lokasi yang banyak ikannya. Arif Satria dalam buku *Ekologi Politik Nelayan* (Satria, 2009) menulis tentang pengetahuan lokal nelayan yang belum terkuak sains. Mereka tahu kapan dan di mana ikan bertelur sehingga mereka membuat aturan larangan penangkapan ikan untuk kurun tertentu (*closed season*), serta isyarat-isyarat alam yang diketahui nelayan dijadikan dasar pembuatan aturan meskipun dalam bentuk mitos-mitos. Inilah kekuatan pengetahuan lokal. Penanda *ongko* biasanya menggunakan botol-botol air mineral yang diikat batu sehingga mengapung.

“Dulu ongko itu cukup ditandai dengan tomba (botol-botol mineral yang diikatkan pada batu atau batang) sehingga mengapung. Nelayan lain ketika melewati ongko yang sudah memiliki penanda tersebut, enggan untuk mengambil ikan di tempat tersebut karena tahu bahwa ada nelayan lain sebelumnya yang memiliki areal tersebut. Namun perkembangan waktu menunjukkan bahwa ada pergeseran nilai yang dimiliki masyarakat. Justru jika tahu ada penanda, maka nelayan bersangkutan akan menguras hasil di lokasi tersebut. Sehingga belakangan nelayan tidak lagi menggunakan penanda di areal ongko, tapi menggunakan tanda-tanda yang ada di darat sehingga tidak bisa terdeteksi. Jika ada nelayan yang membuntuti, maka pemilik ongko akan mengelabuinya dengan sengaja berputar-putar pada lokasi yang jauh dari ongkonya” (Wawancara dengan Informan Sidi Gazalba).

Patawari seorang nelayan pemilik *ongko* dari Desa Appattana Kecamatan Bontosikuyu menuturkan bahwa:

“Tahun 1999 paman saya yang bernama Ambo’ memberitahu lokasi ongko keluarga di arah barat laut Desa Tambolongan, sekitar 45 menit perjalanan dari Desa Appattana menggunakan perahu motor. Kami menamakannya ‘Bajangang Tuka’ (Bayangan Tangga) karena mirip dengan anak-anak tangga. Ada bajangang tuka’ laukang (sebelah barat), bajangang tuka’ rajangang (sebelah timur) dan bajangang tuka’ tangnga-tangnga (di tengah-tengah). Di lokasi ini banyak lobster. Kami mengolahnya tidak tiap hari, tapi satu kali dalam lima hari. Paling banyak rombongan kami sekitar 10 orang, semuanya adalah keluarga dekat, (paman, saudara, saudara sepupu, dan kemenakan). Ambo’ mengetahui lokasi ini juga karena diberitahu oleh pamannya dulu. Kami sangat menjaganya supaya lokasi tersebut tetap menghasilkan, sehingga kebutuhan-kebutuhan keluarga kami bisa terpenuhi. Ongko ini bisa kami pertahankan selama dua tahun. Tahun 2001 ada nelayan lain yang juga berasal dari desa kami mengetahui keberadaan ongko kami. Dia yang kemudian mengabarkan kepada nelayan lainnya. Akhirnya nelayan satu desa ramai-ramai menangkap ikan/lobster di ongko kami tersebut. Penangkapan berlebih tidak bisa dihindari, apalagi ketika sudah mulai ada yang menggunakan bom dan obat bius.”

3.2. Pemanfaatan *Ongko* Dalam Mendukung Pengelolaan Sumberdaya Pesisir

Praktek *ongko*, jika dilihat dari perspektif pengelolaan perikanan ‘modern’ merupakan perangkat aturan yang mengikat kehidupan bersama satu komunitas yang hidup dalam tempat tertentu, unit sosial dan teritorial juga merupakan elemen dari tradisi setempat. *Ongko* juga merupakan kombinasi antara beberapa instrumen pengelolaan. Instrumen tersebut adalah *closing-opening seasons*, yaitu pengaturan buka-tutup eksploitasi dan pihak yang boleh melakukan eksploitasi (*input control*). Artinya, tradisi ini memang mengandung hal-hal positif, dan mampu mengatasi persoalan yang muncul pada praktek pengelolaan sumberdaya laut modern.

“Ongko kami jaga betul agar kami tetap bisa mengolahnya dalam waktu yang lama. Jika kemudian lokasi ongko kami ketahuan oleh masyarakat desa kami sendiri, tidak apa-apa, ongko tersebut akan menjadi milik bersama yang dijaga kelestariannya. Kami buat kesepakatan untuk tidak mengurus hasilnya sehingga tidak terjadi penangkapan ikan yang over. Kita lakukan secara bergantian. Namun jika yang tahu tersebut adalah orang yang berasal dari luar desa, maka kami tidak segan untuk melarangnya karena kebanyakan nelayan dari luar desa menggunakan alat tangkap yang merusak seperti bom dan bius.” (Wawancara dengan Informan Muhammad N)

Dalam konteks kebaharian/pesisir/perikanan, *ongko* berwujud perangkat aturan yang disepakati oleh komunitas kekerabatan tertentu, utamanya komunitas kekerabatan nelayan atau pesisir. Aturan itu mengatur bagaimana seharusnya komunitas itu berinteraksi satu dengan yang lain dan interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam konteks pengelolaan (gabungan antara pemanfaatan dan pemeliharaan) sumberdaya laut/perikanan/pesisir dalam wilayah tertentu. Implementasi aturan-aturan di dalam wilayah komunitas kekerabatan itu, biasanya diawasi oleh kerabat yang paling senior atau dituakan.

Perangkat aturan pada umumnya mengatur hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendefinisian wilayah kelola. Dalam hal ini, ada yang menjelaskan wilayah kelola secara jelas batas-batasnya, ada pula yang hanya menyebutkan zona-zona wilayah laut yang ada di dalam wilayah kelola tanpa secara tegas menyebutkan batas-batas wilayah kelolanya. Wilayah kelola itu, biasanya, kemudian dibagi kedalam beberapa zona. Masing-masing zona akan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya, *ongko Bajangang Tuka*’ di atas membagi wilayah kelolanya ke dalam tiga Zona yakni Zona A (*Bajangang Rajangang*), zona B (*Bajangang Laukang*) dan Zona C (*Bajangang Tangga-tangnga*). Ketika zona A dan zona B diperuntukkan sebagai zona konservasi, maka zona C diperuntukkan sebagai Zona penangkapan ikan tradisional. Dalam konteks pengelolaan, *ongko* juga merupakan praktek yang mengatur pemanfaatan dan konservasi.

Pendapat Berkes dalam (Adhuri 2005), seorang ahli dalam bidang pengelolaan sumberdaya laut, mengenai fungsi praktek-praktek pengelolaan laut tradisional. Berkes mengatakan bahwa hak ulayat memiliki lima peran penting. Pertama, menjamin keamanan penghidupan (*livelihood security*) dengan memberi kesempatan kepada setiap anggota komunitas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya melalui jaminan akses terhadap sumberdaya alam penting. Peran kedua adalah sebagai alat resolusi konflik. Berkes percaya bahwa hak ulayat menyediakan mekanisme untuk memberi akses pemanfaatan yang sama kepada semua anggota komunitasnya. Dengan itu, kemungkinan konflik antar anggota komunitas sebagai akibat dari perebutan akses terhadap sumberdaya tersebut dapat dicegah. Ketiga, hak ulayat berfungsi mengikat

anggota-anggota komunitas menjadi suatu kesatuan sosial yang kompak. Hal ini terjadi karena hak ulayat secara eksplisit menghubungkan keanggotaan komunitas dengan penguasaan terhadap sumberdaya. Hal ini memfasilitasi terbentuknya kelompok kerja dan kerjasama. Keempat, hak ulayat bersifat konservasi karena ia biasanya terkait dengan prinsip *'taking what is needed.'* Terakhir, hak ulayat berfungsi untuk menjaga kelestarian ekologi. Hal ini dikaitkan dengan asumsi bahwa praktek hak ulayat didasari prinsip penyesuaian antara perilaku eksploitasi dengan siklus alam.

Bagaimana dengan *Ongko*? *Ongko* mengedepankan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Jadi selain pertimbangan ekonomis, *ongko* juga mempertimbangkan kepentingan ekologis. *Ongko* juga mengajarkan bahwa laut bukan merupakan sistem ekologi semata, melainkan juga sebuah sistem sosial. *Ongko* bisa menjelma sebagai sebuah institusi dengan aturan yang merefleksikan keyakinan masyarakat lokal tentang cara menjaga dan mengawasi kawasan perairan laut.

Esensi dari pembangunan berkelanjutan (*the postulate of sustainability*) dalam mengidentifikasi kearifan lokal pada dasarnya meliputi tiga aspek, yaitu *ecology*, *economy* dan *social security* yang disebut dengan segitiga keberlanjutan/*triangel of sustainability* (Budiati 2012). Mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan maka ada 3 pilar keseimbangan yang dijadikan indikator keberlanjutan, yaitu ekologi, ekonomi dan sosial budaya. Menurut Meadows ketiga dimensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dimensi ekologi merupakan representasi dari *natural capital* dan *built capital* yang harus terus dipertahankan eksistensinya tanpa menurun kualitasnya dan diefisienkan penggunaannya;
- b. Dimensi ekonomi merupakan representasi dari *human capital* dan *social capital* yang harus dapat dirasakan oleh semua masyarakat;
- c. Dimensi sosial budaya merupakan representasi dari *human and social capital* juga merupakan representasi dari *well being* (pencapaian dari *ultimate ends*) yang harus bisa dicapai oleh semua masyarakat. (Budiati 2012)

Kearifan lokal *Ongko* pada masyarakat pesisir Kepulauan Selayar adalah kearifan menangkap ikan di laut. Kearifan ini berkaitan dengan pengelolaan perikanan melalui pendekatan yang berlandaskan pada integrasi tiga pilar yaitu pilar ekosistem, pilar ekonomi, dan sosial. (Jayakusuma, dkk, 2023). Efisiensi dapat mendorong dengan adanya pengembangan dalam sebuah investasi dan bisnis hasil perikanan dan kelautan dengan tetap melestarikan dan menjaga lingkungan tetap lestari. (Lestari & Suarja, 2023)

4. Kesimpulan

Berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang kearifan lokal *ongko* dan pengelolaan sumberdaya pesisir, penulis berpendapat bahwa kearifan lokal *ongko* di Kepulauan Selayar mendukung unsur-unsur pembangunan berkelanjutan, yaitu: Zona perlindungan (wilayah konservasi), Zona penangkapan (penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota), Pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut dan pesisir yang berorientasi ekspor, pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak, dan pengurangan sampah plastik di laut. Untuk memaksimalkan upaya pengelolaan sumberdaya pesisir tersebut, maka penulis merekomendasikan serangkaian langkah, antara lain: memberikan penguatan agar *ongko* yang merupakan klaim perorangan ataupun kelompok kekerabatan terbatas ditingkatkan menjadi klaim pengelolaan bersama; memperkuat kelembagaan pengelola *ongko* sehingga ada pengaturan waktu

penangkapan dan penggunaan alat tangkap, sebagaimana pernah dipraktekkan *Panglima Menteng* di kawasan Taman Nasional Laut Takabonerate. Konsep ini memiliki potensi menjadi cara yang realistis untuk mengatasi *ambigu* dalam pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir, sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir tercapai, lingkungan pesisir pun dapat lestari dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahim, A.Y., Wahyono, A., Sudiyono, & Arief, A.A. (2015). *Data dasar aspek sosial terumbu karang dan ekosistem terkait di Kabupaten Kepulauan Selayar. Coremap CTI Pusat Penelitian Oseanografi*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Adhuri, D. S. (2005). Menjual laut, mengail kekuasaan: studi mengenai konflik hak ulayat laut di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. (Selling the sea fishing for power: A study on conflict over marine tenure in Kei Islands, Southeastern Maluku). *Masyarakat Indonesia*, 21(1), 127-150.
- Azwar, A. (2007). *Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Selayar* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Angka 2024*. Selayar: BPS.
- Budiati, L. (2012). *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. 2024a. *Data Armada Dan Alat Tangkap Tahun 2023*. Benteng Selayar.
- Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. 2024b. *Data Produksi Perikanan Tahun 2023*. Benteng Selayar.
- Jayakusuma, Z., Lestari, M. M., & Rasudin, N. (2023). Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pantai yang Berpotensi Blue Economy dalam Rangka Pencapaian Sustainable Development Goals di Pulau Rupa Kabupaten Bengkalis. *Riau Law Journal*, 7(1), 114-134.
- Lestari, S., & Suarja, Z. A. (2023). Blue Ekonomi: Dampak Perencanaan Anggaran Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Journal Of Economic Science (JECS)*, 9(1), 27-38.
- Linarwati, M., Fathoni, A., & Minarsih, M. M. (2016). Studi deskriptif pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia serta penggunaan metode behavioral event interview dalam merekrut karyawan baru di bank mega cabang kudus. *Journal of management*, 2(2).
- Poerwandari, E.K. (2007). *Pendekatan Kualitatif dalam penelitian Psikologi*. Jakarta: LPSP3
- Risnawati. (2016). Perilaku Menyimpang Ilegal Fishing. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 4:38–47.
- Satria, A. (2009). *Ekologi Politik Nelayan*. LKIS Pelangi Aksara.

Satria, A. (2015). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Thamrin, H. (2013). Kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan (the lokal wisdom in environmental sustainable). *Kutubkhanah*, 16(1), 46-59.